



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI PUSKESMAS SEKIP KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 3)**

DISUSUN OLEH :

NAMA : MUHAMMAD ALIF MUHARDIANSYAH
NIM : 20.11.176
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

MUHAMMAD ALIF MUHARDIANSYAH, 2024, NIM 20.11.176 Thesis Title Implementation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 Concerning the Acceleration of Stunting Reduction at Sekip Health Center, Palembang City (Case Study Article 3). Supervisor I Mr. Ir.H Heru Adi Putranto, M.Si and Supervisor II Mr. Saiton, S.Sos., M.Si.

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021 Concerning the Acceleration of Stunting Reduction is carried out with target groups of Adolescents, Prospective Brides, Pregnant Women, Breastfeeding Mothers, and Toddlers.

The purpose of this study was to determine the Implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction at Sekip Health Center, Palembang City. The method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Explaining the results of the study conducted from 18 to 22 May 2024. Located at the Sekip Health Center, Palembang City. The results of this study indicate that the Implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction at the Sekip Health Center, Palembang City has been carried out quite well even though there are several communication obstacles. The management of the Sekip Health Center nutrition program has monitored growth and development, promoted exclusive breastfeeding, provided nutritional supplements, handled malnutrition and provided deworming medication. There is cross-sectoral collaboration in handling stunting.

Keywords: Implementation, Acceleration of Stunting Reduction



A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan yang pada dasarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Balita, anak usia sekolah dasar, dan ibu hamil merupakan kelompok sasaran yang sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dampak negatif yang ditimbulkan apabila menderita kekurangan gizi.

Stunting adalah salah satu masalah gizi yang berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak dalam mencapai titik tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi genetiknya. *Stunting* dapat

menghambat proses tumbuh kembang pada balita. *Childhood stunting* atau tubuh pendek pada masa anak-anak merupakan akibat kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak (Kementerian Kesehatan, 2015).

Masalah *stunting* (anak pendek) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. *Stunting* menjadi permasalahan kesehatan karena berhubungan dengan risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal, sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Hal ini menjadi

ancaman serius terhadap keberadaan anak-anak sebagai generasi penerus suatu bangsa. Anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang (Unicef, 2013).

Secara global, sekitar 162 juta anak balita mengalami kependekan. Afrika Sub Sahara dan Asia Selatan adalah rumah untuk tiga perempat anak pendek dunia. Data menunjukkan bahwa 40% balita di Afrika Sub Sahara mengalami *stunting* sedangkan di Asia Selatan tercatat sebesar 39% (*WHO Stunting Infographic*).

Indonesia menduduki peringkat ke lima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi *stunting*. Lebih dari sepertiga anak usia di bawah lima tahun tingginya berada di bawah rata-rata. Riset Kesehatan Dasar (Riset Kesehatan Dasar) 2013 mencatat prevalensi *stunting* nasional mencapai 37,2% terdiri dari 18,0% sangat pendek dan 19,2% pendek, meningkat dari tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%). Artinya, pertumbuhan tak maksimal diderita oleh sekitar 8 juta anak Indonesia, atau satu dari tiga anak Indonesia. Prevalensi *stunting* di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%) (MCA Indonesia, 2014).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizi dilaksanakan pemberian suplementasi gizi bagi



kelompok rawan gizi. Untuk memenuhi kecukupan gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas, diberikan suplementasi gizi.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang mencatat sebanyak 4.641 balita usia 0-5 tahun terkena *stunting* pada 2019. Penderita *stunting* mendominasi di 10 wilayah di kawasan Seberang ulu, Palembang, Sumatra Selatan. Berdasarkan data Aplikasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) *stunting* di Palembang itu di angka 7,9 persen atau 4.641 balita dari keseluruhan yang mencapai 113.718 balita. *Stunting* di Kota Palembang mencapai 27,67 persen atau masih rendah ketimbang standar nasional yakni 30 persen. Penderita *stunting* di Kota Palembang didominasi usia 3-5 tahun, yang mencapai 2.806 balita. Penderita *stunting* di Kota Palembang didominasi di 10 kawasan di Seberang Ulu, salah satunya di Kelurahan Kuto Batu. Dia menuturkan rata-rata warga Kelurahan Kuto batu kesulitan akses air bersih dan kurangnya kebersihan lingkungan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 20 Oktober 2023 di Puskesmas Sekip Kota Palembang telah ditemukan indikasi masalah bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dengan apa itu *stunting* dan bagaimana cara mengatasinya.

Di Puskesmas Sekip, penderita *stunting* terdapat 6 orang (0,4%). Untuk menyikapi *stunting*, Puskesmas Sekip kota Palembang

memberikan buku KIA kepada ibu hamil yang memberikan informasi mengenai gizi yang diperlukan ibu hamil. Serta ibu hamil juga disarankan rutin pemeriksaan agar kesehatan calon bayi terpantau.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3)”**

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3)?
- b) Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3)?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan Stunting di puskesmas sekip kota Palembang.
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan Stunting di kota Palembang.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta untuk mengaplikasikan teori yang di dapat selama perkuliahan kepada persoalan yang sesungguhnya.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan informasi serta sebagai masukan atau saran dalam Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3).

3. Bagi Pembaca/ Lembaga

Sebagai penambah wawasan dan referensi mengenai Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3).

B. LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Riant Nugroho (2004:163) mendefinisikan implementasi secara sederhana sebagai "melakukan pekerjaan" dan "mengerjakannya," menunjukkan bahwa implementasi adalah proses atau strategi yang bisa

dilakukan dengan mudah. Namun, hal ini juga mencakup penerimaan sumber daya tambahan untuk mempertimbangkan tindakan yang perlu diambil.

Namun, suatu kebijakan dan implementasinya tak selamanya dapat berjalan dengan baik. Pasti terdapat berbagai kendala, permasalahan, ataupun kegagalan mencapai tujuan. Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi:

Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.

- a) Ketersedian waktu dan sumber daya yang cukup.
- b) Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
- c) Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara satu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
- d) Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam



tingkat koordinasi (Wahab, 2008: 272)

Sukses gagalnya suatu kebijakan atau implementasinya dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan terhadap kebijakan tersebut, adanya sumber daya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisitas kegiatan/proses dari para pelaku kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan akan menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Maka diperlukan kerangka untuk memantau itu semua yaitu melalui suatu model implementasi.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

2.2 Model Implementasi

Menurut George C. Edward III (2002:168) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi. maupun negative.

1. Faktor Sumber Daya (Resources)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan.

Sumber-Sumber Penting Dalam Implementasi Kebijakan Yang Dimaksud Antara Lain Mencakup:

- a. Staf Yang Harus Mempunyai Keahlian Dan Kemampuan Untuk Bisa Melaksanakan Tugas ;
- b. Perintah
- c. Anjuran Atasan/Pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Tersebut.

Hal Ini Dimaksudkan Agar Para Implementor Tidak Akan Melakukan Suatu Kesalahan Dalam Bagaimana Caranya Mengimplementasikan Kebijakan Tersebut. Informasi Yang Demikian Ini Juga Penting Untuk Menyadarkan Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Implementasi, Agar Diantara Mereka Mau Melaksanakan Dan Mematuhi Apa Yang Menjadi Tugas Dan Kewajibannya.

Kewenangan Untuk Menjamin Atau Meyakinkan Bahwa Kebijakan Yang Diimplementasikan Adalah Sesuai Dengan Yang Mereka Kehendaki,



Dan Fasilitas/Sarana Yang Digunakan Untuk Mengoperasionalkan Implementasi Suatu Kebijakan Yang Meliputi: Gedung, Tanah, Sarana Dan Prasarana Yang Kesemuanya Akan Memberikan Pelayanan Dalam Implementasi Kebijakan. Kurang Cukupnya Sumber-Sumber Ini Berarti Ketentuan-Ketentuan Atau Aturan-Aturan Tidak Akan Menjadi Kuat, Pelayanan Tidak Akan Diberikan Dan Pengaturan Yang Rasional Tidak Dapat Dikembangkan.

2. Struktur Birokrasi

Meskipun Sumber-Sumber Untuk Mengimplementasikan Suatu Kebijakan Sudah Mencukupi Dan Para Implementor Mengetahui Apa Dan Bagaimana Cara Melakukannya, Serta Mereka Mempunyai Keinginan Untuk Melakukannya, Implementasi Bisa Jadi Masih Belum Efektif, Karena Ketidakefisienan Struktur Birokrasi Yang Ada.

3. Faktor Komunikasi

Komunikasi Adalah Suatu Kegiatan Manusia Untuk Menyampaikan Apa Yang Menjadi Pemikiran Dan Perasaannya, Harapan Atau Pengalamannya Kepada Orang Lain Menurut Teori George C. Edward Iii Faktor Komunikasi Dianggap Sebagai Faktor Yang Amat Penting, Karena Dalam Setiap Proses Kegiatan Yang Melibatkan Unsur Manusia Dan Sumber Daya Akan Selalu Berurusan Dengan

Permasalahan “Bagaimana Hubungan Yang Dilakukan” (Nugroho, 2003:201)

4. Faktor Disposisi (Sikap)

Kecenderungan Perilaku Atau Karakteristik Dari Pelaksana Kebijakan Berperan Penting Untuk Mewujudkan Implementasi Kebijakan Yang Sesuai Dengan Tujuan Atau Sasaran. Karakter Penting Yang Harus Dimiliki Oleh Pelaksana Kebijakan Misalnya Kejujuran Dan Komitmen Yang Tinggi. Kejujuran Mengarahkan Implementor Untuk Tetap Berada Dalam Asa Program Yang Telah Digariskan, Sedangkan Komitmen Yang Tinggi Dari Pelaksana Kebijakan Akan Membuat Mereka Selalu Antusias Dalam Melaksanakan Tugas, Wewenang, Fungsi, Dan Tanggung Jawab Sesuai Dengan Peraturan Yang Telah Di Tetapkan.

Implementasi yang digunakan adalah model Implementasi George C. Edward adalah teori yang mencakup empat faktor seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu implementasi yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang diambil dalam suatu kebijakan dalam sebuah penelitian ini adalah model implementasi George C Edward III mencakup empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. ke empat faktor diatas dialkaksanakan secara bertahap tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang suatu implementasi kebijakan.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak



Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya (Affandi, 2009:13).

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (26) menyebutkan : “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2.2 Pertumbuhan Anak

Konsep tumbuh kembang merupakan suatu hal yang mutlak pada anak, maksudnya tumbuh adalah proses bertambah besarnya sel – sel serta bertambahnya jaringan intraseluler. Sedangkan yang dimaksud dengan kembang atau berkembang adalah proses pematangan fungsi atau organ tubuh termasuk perkembangan kemampuan mental dan kecerdasan serta perilaku anak Campbell (2000:52).

Proses tumbuh kembang anak adalah masa balita, karena pada masa pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Perkembangan anak terdiri dari : perkembangan motorik kasar (pergerakan dan sikap tubuh); perkembangan motorik halus (menggambar, memegang suatu benda dan lain – lain); perkembangan bahasa (kemampuan respon suara, mengikuti perintah, dan berbicara sopan); kepribadian atau tingkah laku (berinteraksi dengan lingkungannya) Kania (2009:23).

2.3 SUPLEMEN GIZI

Gizi (*nutrients*) merupakan ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Disamping untuk kesehatan, gizi dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Almatsier (2002:55).

Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit tetapi ada dalam makanan. Zat gizi yang termasuk kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin.



Konsumsi makanan merupakan faktor utama yang berperan terhadap status gizi seseorang. Metode pengukuran konsumsi pangan untuk individu, antara lain metoderecall24 jam, metode estimated food recall, metode penimbangan makanan (food weighing), metode dietary history, dan metode frekuensi makanan (food frequency).

2.4.2 Dampak Stunting Pada

Balita

Laporan UNICEF tahun 2010, beberapa fakta terkait *stunting* dan pengaruhnya adalah sebagai berikut.

1. Anak yang mengalami *stunting* lebih awal yaitu sebelum usia enam bulan, akan mengalami *stunting* lebih berat menjelang usia dua tahun. *Stunting* yang parah pada anak, akan terjadi defisit jangka panjang dalam perkembangan fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal di sekolah dibandingkan anak dengan tinggi badan normal. Anak dengan *stunting* cenderung lebih lama masuk sekolah dan lebih sering absen dari sekolah dibandingkan anak dengan status gizi baik. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap kesuksesan dalam kehidupannya dimasa yang akan datang. *Stunting* akan sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Faktor dasar yang menyebabkan *stunting* dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan intelektual.

Penyebab dari *stunting* adalah bayi berat lahir rendah, ASI yang tidak memadai, makanan tambahan yang tidak sesuai, diare berulang, dan infeksi pernapasan. Berdasarkan penelitian sebagian besar anak dengan *stunting* mengkonsumsi makanan yang berbeda di bawah ketentuan rekomendasi kadar gizi, berasal dari keluarga banyak, bertempat tinggal di wilayah pinggiran kota dan komunitas pedesaan.

2. Pengaruh gizi pada usia dini yang mengalami *stunting* dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang kurang. *stunting* pada usia lima tahun cenderung menetap sepanjang hidup, kegagalan pertumbuhan usia dini berlanjut pada masa remaja dan kemudian tumbuh menjadi wanita dewasa yang *stunting* dan mempengaruhi secara langsung pada kesehatan dan produktivitas, sehingga meningkatkan peluang melahirkan BBLR.
3. *Stunting* terutama berbahaya pada perempuan, karena lebih cenderung menghambat dalam proses pertumbuhan dan berisiko lebih besar meninggal saat melahirkan. Akibat lainnya kekurangan gizi/*stunting* terhadap perkembangan sangat merugikan *performance* anak. Jika kondisi buruk terjadi pada masa *golden period* perkembangan otak (0-2 tahun) maka tidak dapat berkembang dan kondisi ini sulit untuk dapat pulih kembali.

2.5 Peraturan Presiden Republik (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 3



Perpres ini mengatur antara lain mengenai:

- 5 Strategi nasional percepatan penurunan stunting;
- 6 Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- 7 Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- 8 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 9 Pendanaan

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Remaja adalah kelompok usia 10-18 tahun dan masa dimana peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa.

Calon pengantin adalah pasangan (laki-laki dan perempuan) yang yang belum mempunyai ikatan baik secara hokum agama maupun hukum negara.

Ibu hamil adalah seseorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.

Ibu Menyusui adalah ibu yang memberikan air susu kepada bayi dari buah dada.

Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan adalah anak yang telah menginjak usia diatas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian anak dibawah lima tahun.

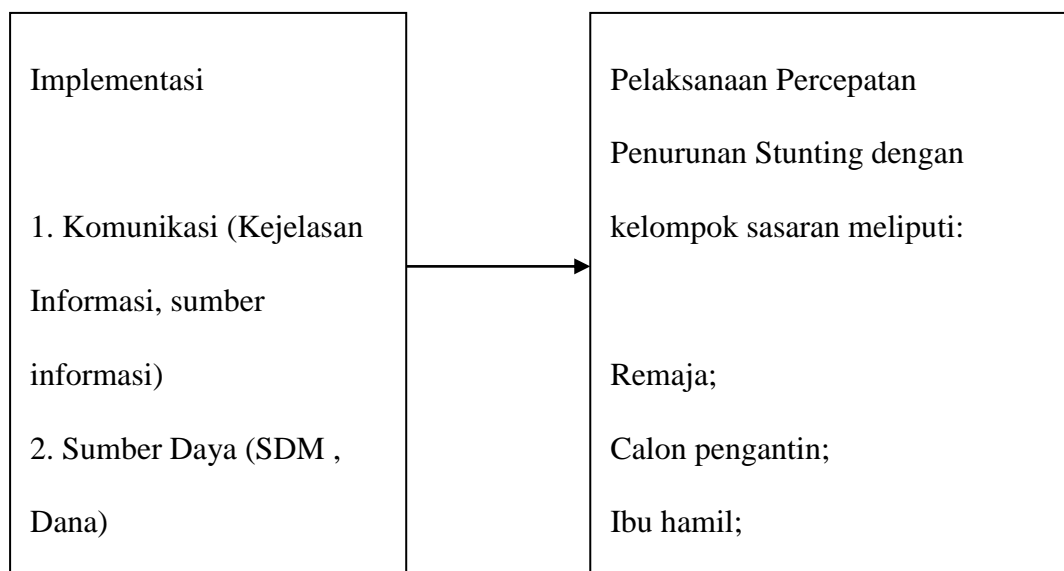
2.6 Kerangka Berpikir

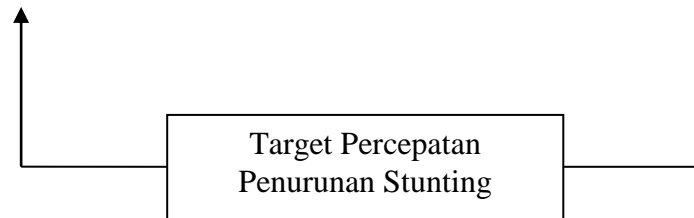
Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori,observasi,fakta,serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah.

Gambar 3

Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021

Kerangka Berpikir





C. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian” Arikunto (2010:3).

3.2 Definisi Konsep

Agar tidak terjadi kekaburan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

Pelaksanaan percepatan adalah upaya pemerintah yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, intergratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

3.3 Definisi Operasional

Defenisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut Effendi (2011:146).

3.4 Informan Penelitian

Key informan adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai keterampilan unik, atau latar belakang profesional yang berhubungan dengan isu atau intervensi program yang sedang diteliti...istilah *key* menunjukkan pada setiap orang yang dapat menyediakan informasi rinci dan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya mengenai isu atau masalah tertentu yang berhubungan dengan objek penelitian (Wirawan, 2012:205).

Tabel 2.
Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pemegang program gizi Puskesmas Sekip	1 orang
2.	Staff Puskesmas Sekip	1 Orang
3.	Ibu Pasien anak Puskesmas Sekip	3 Orang
	Jumlah	Orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memiliki 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder.



Data primer adalah data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, dan dari hasil observasi suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian.

Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang di dapat secara tidak langsung, seperti dari buku, catatan, bukti yang sudah ada, atau arsip baik yang sudah di publikasikan atau yang tidak di publikasikan secara umum.

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan (valid). Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah berikut.

Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada obyek penelitian (Nawawi, 2003: 100). Hal tersebut bisa dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas aparat/pegawai baik di dalam maupun di luar kantor, kondisi bangunan termasuk perlengkapannya, interaksi sosial, dan keadaan lokasi serta melihat proses pelayanan, kegiatan kerja, komunikasi antara aparat .

Wawancara

Wawancara yaitu untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan dari narasumber/informan dengan jalan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini wawancara

dilakukan secara mendalam dengan pimpinan, pegawai, dan selain itu diminta persepsi masyarakat dengan mewawancarai masyarakat yang terdiri dari; lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pengguna jasa sebagai syarat yang dijadikan sebagai responden yang telah ditentukan sebelumnya.

Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi, berkaitan dengan dokumen pemerintah kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, laporan kemajuan, kliping, dan artikel di media masa.

Studi Pustaka

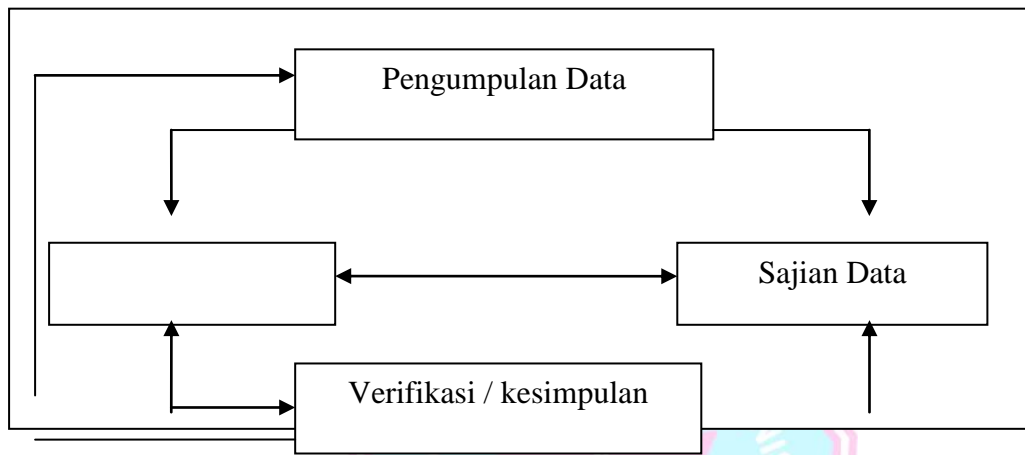
Studi Pustaka yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Sugiyono (2013:218) yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan. Proses analisis interaktif disajikan dalam bentuk gambar berikut.

Gambar 4

Analisis Model Interaktif



Sumber: Sugiyono (2013:218)

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data karenanya merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain merupakan pilihan-pilihan analisis. Data terlebih dahulu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya sehingga dapat membantu dalam memberi kode kepada aspek-aspek tertentu. Sebagai alat analisis, reduksi

data dapat menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian, data yang direduksi memberi gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan. (Miles & Huberman,1992:16).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan/penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data juga merupakan sebuah langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matrik, dan grafik dilakukan



tahapan dengan mendiskusikan selanjutnya memberikan penafsiran dan interpretasi. Memberikan interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian. (Nazir, 2000: 437).

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan. Untuk itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan longgar, tetap terbuka, skeptis sifatnya meskipun kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, dan kemudian meningkat menjadi lebih rinci serta membangun wawasan umum. Dalam kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya proses kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan yang begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan intersubyektif.

D. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan

Stunting Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui observasi, studi pustaka dan wawancara. Yang akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2024 s.d 22 Mei 2024. Bertempat di Puskesmas Sekip Kota Palembang dengan judul Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia (PREPRES) No.72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3). Untuk mendapatkan data yang relevan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan 5 informan.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Puskesmas Sekip Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Komunikasi implementasi Standar Produk Suplementasi Gizi Cegah Stunting pada Anak dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat, secara tidak langsung dengan menggunakan poster, leaflet, brosur bahkan media sosial. Hanya saja maraknya media



social yang memberikan informasi hoax tentang stunting itu sendiri. Seperti tentang penyebab anak Indonesia mengalami kurang gizi dikarenakan konsumsi susu kental manis. Banyak orang tua tidak paham tentang informasi gizi

2. Sumber Daya

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2021,kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia dan finansial. Berdasarkan wawancara dengan Pengelola Program Gizi mengatakan bahwa:

“Pengelolaan program gizi yang dilaksanakan meliputi tenaga di tingkat Puskesmas dengan kualifikasi tenaga kesehatan yang berkualitas khususnya tenaga pengelola gizi. Sebagai ujung tombak pelayanan perbaikan gizi masyarakat, diharapkan tenaga pengelola gizi mampu melaksanakan pemantauan pertumbuhan, promosi ASI eksklusif, pemberian suplemen gizi, penanganan kekurangan gizi dan pemberian obat cacing.

3. Disposisi

Disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus Sikap para pelaksana ini merupakan suatu bentuk dari tingkah laku pegawai dan masyarakat.

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Dessy Natalia Staf Puskesmas bahwa:

“Petugas kesehatan di Puskesmas harus mencapai target yang telah ditetapkan, guna tercapainya Palembang bebas stunting. Dan pimpinan sangat memperhatikan program ini”. (Wawancara 18 Mei 2024)

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola program gizi Puskesmas Sekip Yeni Indah Purnama mengatakan bahwa:

“Untuk mensukseskan program gizi kegiatan ini harus dilakukan dengan kerjasama lintas program, lintas sektoral, organisasi profesi dan petugas masyarakat/kader.”(Wawancara 18 Mei 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R. 2009. *Fisiologi Ikan Respirasi dan Sistem Sirkulasi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brooks, G. F. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran. Edisi I. Terjemahan*. Jakarta: Salemba Medika.



- Campbell, K. L. 2009. *Companion Animals Their Biology Care Health and Management Second Edition*. London: Pearson Prentice.
- Depkes. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Edward III, Geoge C. 2002. *Implementing public policy*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta
- Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- IAKMI. 2012. *Naskah Akademik Pendidikan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta.
- Kandun I N et al. *Penelitian Kekebalan Bawaan dan Serokonversi setelah Vaksinasi Campak pada Bayi di Mojokerto*. Laporan Seminar, 198
- Kania. 2009. *Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Untuk Mencapai Tumbuh Kembang yang Optimal*.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Medika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia 2014*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Jakarta: Kemenkes RI .
- Moh. Nazir. 2000. *Metode Penelitian. Cetakan Kelima*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi. 2003. *Pengumpulan Data Penelitian*. Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat ; Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Riant, Nugroho.2003, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Alfabeta
- Riant, Nugroho.2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Singarimbun, Effendi.2011, *Metode Penelitian Survei*. Bandung:LP3ES
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabetha.
- Supardi, dkk. STIA, 2023, *Buku Panduan Skripsi*. Palembang : STIA SATYA NEGARA
- Wahab. 2008. *Model Implementasi*. Jakarta: PT.Reduksi.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (26).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Peraturan Menteri kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

